

DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG

(Impact of Tourism Sector on Regional Income in Belitung Regency)

Mandala Harefa

Pusat Penelitian, Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Email: mandhar@dpr.go.id

Naskah diterima: 19 November 2019

Naskah direvisi: 2 Desember 2019

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2020

Abstract

In recent years tourism becomes one of the important economic sectors as a source of regional income. The local governments that are able to manage tourism objects well will have greater opportunities to increase local revenue (PAD). Belitung Regency is one of the regions that have a major income source from the tourism sector and it has also got famous since the film Laskar Pelangi. To develop the tourism sector is not easy, including how to provide a high contribution to regional income. This study aims to analyze the problem and development of the tourism sector's contribution to local revenue in the Belitung Regency. A descriptive qualitative method is applied to answer the research. Primary data is obtained through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with relevant stakeholders, while secondary data is sourced from various publications. The results show that regional income from Belitung Regency's tourism sector tend to increase. The direct impact is obtained from the construction of hotels, restaurants, and transportation procurement. While various tax revenues (hotels and restaurants) and retribution from tourism activities as an indirect impact. Based on the total of regional income, the contribution of the tourism sector's revenue is less significant. Some points that need to be considered in order to optimize the tourism sector's revenue in Belitung Regency are to overcome the limitations of tourism object supporting facilities, encourage the quality and quantity of tourism human resources, and encourage more intensive tourism promotion.

Keywords: local revenue, tourism, proportion, tourists, impact

Abstrak

Beberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film Laskar Pelangi. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan *focus group discussion* (FGD) terhadap *stakeholders* terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, pariwisata, proporsi, wisatawan, dampak

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata pada dasarnya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan objek wisata dan kegiatan pendukung pariwisata. Pembangunan objek wisata ataupun kawasan wisata yang dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, memiliki efek berganda karena dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi ikutan lainnya, seperti jasa perhotelan, restoran, jasa hiburan dan rekreasi, agen perjalanan, dan sebagainya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan dilanjutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, pariwisata menjadi prioritas nasional. Pada RPJMN tersebut, ditargetkan kunjungan jumlah wisatawan asing dapat mencapai 20 juta orang, sedangkan wisatawan nusantara mencapai 275 juta orang. Dengan target tersebut peringkat daya saing pariwisata Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi 25 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih 31 juta orang pada tahun 2025 (Bappenas, 2019).

Pengembangan pariwisata sendiri bukan merupakan bagian kegiatan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut berbagai dimensi sosial dan budaya yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pada pengembangan potensi pariwisata daerah, peran pemerintah daerah tidak dapat diabaikan begitu saja. Potensi sektor pariwisata daerah ini penting dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam pengembangan potensi sektor tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan devisa dari sektor pariwisata sebesar Rp260 triliun selama 5 tahun ke depan. Angka tersebut menurut Menteri Pariwisata 2014-2019 sangat wajar, mengingat selama tahun 2014 sektor pariwisata mampu menyumbang devisa sebesar USD10,69 miliar atau setara dengan Rp136 triliun (Biro Hukum dan Komunikasi Publik, 2015). Pada tahun 2017 pengembangan sektor pariwisata lebih difokuskan dan dilaksanakan secara konsisten bertepatan dengan *“Wonderful Indonesia”*. Pariwisata juga merupakan salah satu dari 5 sektor prioritas pembangunan 2017 (indopos.com, 2018), selain pangan, energi, maritim, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Semua sektor ini tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Salah satu kesungguhan pemerintah mengembangkan pariwisata nasional tampak dari pembentukan KEK pariwisata.

Dengan mengacu potensi yang sangat besar dari sektor pariwisata, tentunya wajar bila sektor tersebut menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meraup devisa. Kini sektor tersebut sudah ada di posisi kedua sebagai sektor penghasil devisa terbesar nasional. Publikasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) (kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menunjukkan pada tahun 2016 devisa pariwisata sudah mencapai USD13,5 juta per tahun, di bawah penerimaan dari minyak sawit mentah (CPO) yang mencapai USD15,9 juta per tahun (Sukmana, 2017).

Dalam era otonomi, sektor pariwisata tersebut tentunya akan menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, di mana daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan, pembiayaan atas pengeluaran yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang perimbangan keuangan dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, daerah harus mampu menggali sumber-sumber baru sebagai potensi PAD dengan jalan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, salah satunya sektor pariwisata (Yani, 2013).

Pelimpahan kewenangan tersebut telah diatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) nasional secara proporsional. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah dapat mencari sumber-sumber keuangan yang memiliki potensi menjadi penerimaan daerah. Dengan demikian, kondisi daerah yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi salah satunya terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Koeswara, 2000).

Searah dengan penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten/kota maka kewenangan diberikan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber penerimaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Sumber-sumber penerimaan itu berasal dari PAD, bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan PAD dan hal itu menjadi salah satu komponen penerimaan daerah. Dalam realisasinya, banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena kecilnya PAD. Padahal, banyak daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik terutama dari sektor pariwisata.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain (Halim & Kusufi, 2002). Pendapat yang sama dikemukakan Mardiasmo (2002) bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Namun demikian, menurut Mahi (2000) masih rendahnya perolehan PAD dalam total penerimaan daerah disebabkan pemerintah daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat selama ini, sehingga upaya peningkatan PAD daerah menjadi relatif rendah. Selain itu, relatif rendahnya basis pajak/retribusi tersebut juga dipengaruhi karena pemerintah daerah kurang berminat untuk menggali objek pajak/retribusi yang potensial, dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Hal ini memberikan tantangan kepada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial dengan mengembangkan berbagai objek wisata agar menjadi tujuan wisata. Tentu pengembangannya tidak hanya mampu bersaing di dalam, tetapi juga di luar negeri. Sebagai contoh, sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15 persen, Rp280 triliun untuk devisa negara, 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan nusantara, dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada tahun 2019 (Susanti, 2017). Lebih jauh, sektor pariwisata diyakini mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tersebar di seluruh wilayah tanah air.

Namun demikian, sektor pariwisata belum secara signifikan menopang PAD, hanya daerah-daerah tertentu seperti Bali, Lombok, Jakarta, dan Batam yang memiliki proporsi penerimaan yang signifikan dari sektor pariwisata. Penerimaan daerah pariwisata Indonesia masih jauh dari capaian optimal, bahkan jauh lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga dengan potensi yang lebih kecil, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia.

Padahal dalam era otonomi daerah peran kepala daerah, gubernur, bupati, walikota akan menentukan sekitar 50 persen kesuksesan daerah dalam mengembangkan dan menopang sektor pariwisata. Hal ini karena penerimaan daerah dari sektor tersebut merupakan salah satu komponen andalan penerimaan di era otonomi daerah. Seperti pernyataan (Chen, 2011) bahwa industri pariwisata bermanfaat untuk pendapatan pajak, peningkatan lapangan kerja, dan sumber pendapatan tambahan bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata. Artinya, semakin besar proporsi PAD dari potensi pariwisata dalam APBD misalnya, akan lebih mudah bagi pemerintah daerah mengakomodasi kebutuhan anggaran di daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan bersangkutan. Tentunya pungutan tersebut harus sesuai regulasi yang berlaku agar dapat dipungut secara intensif dan efisien (Harun, 2004).

Dengan adanya program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata maka sektor ini harus mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan sektor pariwisata harus terus ditingkatkan dengan mengembangkan pendayagunaan seluruh sumber dan potensi kepariwisataan yang ada. Selain itu, diharapkan potensi pariwisata dapat diandalkan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah untuk menghadapi era globalisasi.

Pariwisata memiliki banyak definisi. Sihite (2000) misalnya, menjelaskan pariwisata adalah suatu

perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan tamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Hal yang sama juga dikemukakan Spillane (1987) bahwa pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha untuk keseimbangan, keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dengan dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu pengetahuan.

Tidak jauh berbeda dengan Kodhyat (1996) yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu fenomena yang timbul oleh salah satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan (*travel*). Perjalanan itu untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan edukatif. Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (1991), pariwisata berasal dari dua kata, yakni pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*travel*" dalam Bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "*tour*".

Dari ketiga definisi para ahli tersebut dapat diambil satu benang merah, yakni perpindahan individu ataupun kelompok manusia dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mendapatkan kepuasan lahir maupun batin. Sementara secara industri, Pemerintah Indonesia telah merumuskan secara jelas melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Salah satu daerah yang memanfaatkan pariwisata sebagai PAD adalah Kabupaten Belitung. Menurut data BPS, tren jumlah wisatawan ke Kepulauan Bangka-Belitung meningkat pesat sepanjang tahun 2011-2017, BPS mencatat rata-rata kunjungan wisatawan meningkat sebesar 29 persen. Pada tahun 2017, tercatat kunjungan wisatawan mencapai 380.941 orang. Ini berarti terjadi peningkatan 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total pengunjung itu persentase pelancong mancanegara masih terbatas, yaitu sebesar 2,4 persen atau sejumlah 9.358 orang (Indonesia.go.id., 2019).

Kabupaten Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak objek wisata alam dan

potensi sektor-sektor pariwisata lainnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung membuat pemerintah dan masyarakat setempat mulai memfokuskan pendapatan dari sektor pariwisata dan perlahan-lahan mulai meninggalkan sektor pertambangan timah. Kebijakan moratorium tambang timah yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, semakin memantapkan langkah Belitung untuk mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan kegiatan pariwisata memiliki proporsi sebagai penyumbang terbesar penerimaan PAD sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi, bahkan proporsi penerimaan dari sektor pariwisata telah mencapai 40 persen (koran-jakarta.com., 2018).

Dalam perkembangannya, Kabupaten Belitung telah mampu meningkatkan PAD-nya dari kegiatan sektor pariwisata. Artinya, hal ini merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri atau *self-supporting* dalam keuangan melalui PAD. Dari hal tersebut tampak jenis faktor keuangan daerah yang merupakan titik sentral yang menjadi bagian peningkatan proporsi pendapatan daerah bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Kaho, 2007).

Terkait dengan topik tersebut, Rosa *et al.* (2016) telah melakukan penelitian mengenai analisis sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2004-2014. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa jumlah objek wisata dan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh terhadap PAD, sedangkan PDRB tidak mempunyai pengaruh terhadap PAD. Sedangkan hasil analisis Suastika & Yasa (2017) diperoleh hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. PAD sebagai variabel mediasi hubungan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Purwadinata & Kaluge, (2017) menunjukkan bahwa program inovasi pajak daerah memiliki potensi untuk memperlambat inovasi pemerintah daerah di sektor lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa inovasi pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal karena masih banyak inovasi program lain yang memerlukan rencana tindak lanjut dari program pajak daerah sehingga terkesan memperlambat inovasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara khusus penelitian ini akan difokuskan untuk melihat dampak penerimaan keuangan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang merupakan bagian kegiatan dari sektor pariwisata. Selanjutnya, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggali informasi sebagai bagian evaluasi terhadap implementasi program pemerintah pusat dalam peningkatan devisa dari sektor pariwisata dan menggali potensi PAD dari sektor pariwisata. Kabupaten Belitung merupakan daerah otonom yang memiliki banyak objek menarik sebagai tujuan wisata. Namun dalam realitasnya kabupaten tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk mengoptimalkan realisasi target penerimaan daerah. Dengan mengacu pada beberapa hal tersebut, penelitian ini secara konkret bertujuan untuk mengetahui dampak peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk menopang PAD.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian maka digunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang proporsi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung. Adapun data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan (a) wawancara mendalam dengan *stakeholders* terkait di Kabupaten Belitung, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi sekolah tinggi pariwisata dan (b) *focus group discussion* (FGD).

Kegiatan pengumpulan data primer dilakukan di wilayah Kabupaten Belitung pada tahun 2018. Seluruh *stakeholders* tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai penyusun kebijakan, pelaku langsung, dan pemerhati permasalahan pariwisata. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai terbitan terpercaya, seperti BPS, Bappeda Kabupaten Belitung, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dan artikel lain yang bersumber dari internet. Seluruh data tersebut kemudian dikompilasi dan disesuaikan dengan fokus studi ini dan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan serta rekomendasi dalam rangka upaya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan proporsi penerimaan PAD dari sektor ini. Dalam upaya menyusun hasil analisis, penelitian ini juga melakukan kegiatan pra penelitian lapangan sebelum wawancara mendalam dengan *stakeholders*. Kegiatan tersebut dilakukan mencakup studi dokumentasi dan kepustakaan serta

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Belitung, Tahun 2017

	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman
Subtot.	29,551	481	26,411	687	28,303	908	31,588	752	31,207	601	27,798	775
Tot.	30,032		27,098		29,211		32,340		31,808		28,573	
	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman
Subtot.	32,903	752	26,650	953	27,923	766	33,664	984	33,178	665	40,740	1,034
Tot.	33,655		27,603		28,689		34,648		33,843		41,774	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Belitung, 2018.

diskusi kelompok terfokus dengan narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata dan Dampaknya terhadap Penerimaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung menjadi kunci pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan pendapatan dan belanja daerah dalam pembangunan. Selama tahun 2012-2016, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan dengan memegang prinsip efisiensi, baik terkait pendapatan maupun belanja. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak pada peningkatan perkembangan penerimaan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian daerah. Kondisi ini diperkuat dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah terutama peningkatan PAD, salah satunya dari sektor pariwisata.

Pendapatan sektor pariwisata merupakan bagian dari PAD yang berasal dari kegiatan pariwisata yang di dalamnya terdapat retribusi dan pajak seperti hotel, restoran, dan yang lainnya (Udayantini et al., 2015). Di Indonesia, pajak atas hotel diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pemerintah daerah mencari potensi lain dengan cara memverifikasi data dan pendataan terkait dengan potensi-potensi pajak dan retribusi daerah dari sektor pariwisata. Hal ini karena pariwisata di daerah Belitung menunjukkan perkembangan yang berdampak positif, sehingga pendapatan dari sektor pariwisata meningkat pesat. Perkembangan ini sebagai dampak dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang disebabkan oleh meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata dan promosi, serta hasil program dan kegiatan pariwisata lainnya.

Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) Kabupaten Belitung pada 2014 sebesar 281.049 orang, sementara tahun 2015, jumlah wisatawan sebanyak 251.440 orang yang terdiri dari 247.053 orang wisnus dan 4.387 orang wisman dan selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 292.885 orang wisatawan yang terdiri dari 285.773 orang wisnus dan 7.112 wisman atau meningkat sebesar 0,15 persen dan terakhir meningkat 189 persen menjadi 812.567 orang wisatawan pada 2018.

Pertumbuhan pariwisata kabupaten tersebut dari tahun ke tahun sangat besar. KEK ini memberi pengaruh yang besar. Pembangunan secara umum juga secara otomatis mengalami percepatan dari dampak kenaikan jumlah wisatawan tersebut. PAD Kabupaten Belitung menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2017, nilainya mencapai Rp193,18 miliar. Jumlah tersebut meningkat signifikan 41,21 persen atau riilnya Rp56,38 miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, PAD-nya berada di angka Rp136,80 miliar. Bahkan Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan sebanyak 500.000 kunjungan wisatawan ke daerah ini pada tahun 2020. Hal tersebut dilakukan melalui 80 kegiatan pariwisata pada tahun 2020 dan peningkatan frekuensi penerbangan.¹

Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan di kabupaten ini diharapkan berperan penting untuk mendorong perhatian pemerintah daerah lain yang bergantung pada sektor pariwisata (Dewi & Bendesa, 2013). Hal ini karena terbukti bahwa jumlah kunjungan wisatawan akan membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah (Widiana & Sudiana, 2015). Hal ini misalnya ditunjukkan bahwa wisatawan yang melakukan perjalanan di suatu daerah akan membeli barang untuk keperluan maupun oleh-oleh (Roostika, 2012).

¹ Hasil diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, 2018.

Dalam upaya untuk mendukung sektor pariwisata, akomodasi yang bisa menampung wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Belitung dibangun karena akomodasi penginapan merupakan salah satu komponen penting di dalam industri ini. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas ini merupakan syarat bagi pengembangan dan pembangunan industri pariwisata. Tanpa dukungan ketersediaan fasilitas tersebut maka laju pertumbuhan pariwisata akan melambat. Selama kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah tempat akomodasi yang ada bertambah jumlahnya dari tahun 2015 sebanyak 43 buah menjadi 51 buah pada tahun 2016 dan tahun 2018 menjadi 56 hotel berbintang 4 ada sekitar 5 hotel, tipe bintang 3 ada 3 hotel dan tipe bintang 2 berjumlah sekitar 4 hotel dan selebihnya adalah tipe kelas melati dan *cottage*. Dari jumlah keseluruhan tersebut total kamar yang tersedia sekitar 2.101 kamar. Hal itu menunjukkan bahwa permintaan akan tempat penginapan semakin meningkat karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung. Perkembangan jumlah tempat penginapan disajikan pada Tabel 2.

Penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca-era desentralisasi menunjukkan peningkatan yang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2,163 triliun, dan jumlah PAD-nya sendiri sebesar Rp575 miliar atau 26,56 persen dari total pendapatan daerah. Berdasarkan skala interval derajat rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori cukup, yaitu 26,56 persen. Hal ini berarti kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ketergantungannya pada dana pusat/fiskal pusat sebesar Rp1,126 triliun atau 52,06 persen.

Sedangkan Kabupaten Belitung telah mencapai PAD sebesar Rp120 miliar hingga saat ini. Dari jumlah itu, sebesar 40 persen atau setara Rp48 miliar berasal dari pariwisata maupun pembangunan

hotel. Sebanyak 40 persen penerimaan lainnya bersumber dari tambang timah, pasir, hasil kelautan, dan perkebunan. Penerimaan dari sektor pariwisata mampu meningkatkan PAD, karena banyaknya hotel yang berbintang dan melati di Kabupaten Belitung. Beberapa hotel yang telah dibangun di sini antara lain, Hotel Santika dengan nilai investasinya sebesar Rp200 miliar dengan jumlah 136 kamar. Hotel JW Marriot dan Swiss-Belhotel juga berinvestasi sebesar Rp200-300 miliar dengan bangunan 4-5 lantai (Dinas Penanaman Modal, Kab Belitung, 2018).²

Sebagai destinasi wisata, Kabupaten Belitung diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah di sektor pariwisata. Saat ini, wisata Kabupaten Belitung mayoritas masih dikunjungi masyarakat dalam negeri atau 70 persen wisatawan lokal serta sisanya dari luar dengan jumlah wisatawan rata-rata mencapai 200 ribu wisatawan per tahun. Bila melihat perkembangan PAD-nya, pada tahun 2010 realisasinya mencapai Rp16.073.621.467, mengalami peningkatan dari yang dianggarkan hanya sebesar Rp12.909.309.649. Demikian pula pada tahun 2011 realisasi mencapai Rp28.593.342.027, meningkat signifikan. Bahkan pada tahun 2017 meningkat sangat signifikan menjadi Rp96.725.121.185, meningkat 30 persen jika dibandingkan dengan yang dianggarkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, nilai tersebut naik sekitar 29 persen. Pada tahun 2017, nilainya meningkat menjadi sebesar Rp193.196.265.848,73 dan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp191.938.969.495,04. Sedangkan proporsi penerimaan yang terbesar masih diperoleh dari pajak pertambangan mineral bukan logam, namun kecenderungannya semakin menurun (BPPDRD, Kab. Belitung, 2018).³

Sedangkan penerimaan proporsi dari pajak hotel, hiburan dan restoran realisasinya jauh melebihi target. Pada tahun 2010 misalnya, target pajak daerah sebesar Rp12.909.309.649 dan realisasinya mencapai Rp16.073.622.467, pajak hotel proporsinya sekitar 3,7 persen, sedangkan pajak restoran proporsinya sekitar 7,06 persen dari pajak daerah yang merupakan PAD Kabupaten Belitung. Realisasi pajak daerah pada tahun 2017 mencapai Rp96.725.121.185 sedangkan proporsi pajak hotel sekitar 8,83 persen dan pajak restoran proporsinya 5,30 persen. Perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, proporsi peningkatan dari kegiatan pariwisata masih kecil secara umum. Kondisi

Tabel 2. Perkembangan Tempat Penginapan Kabupaten Belitung, Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Hotel Bintang dan Akomodasi
2012	29
2013	33
2014	38
2015	43
2016	51
2018	56

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, 2018.

² Hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung tahun 2018.

³ Jawaban tertulis dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Daerah	12.909.309.649	16.073.621.467	18.352.301.467	28.593.342.027	21.397.356.700	24.779.779.805	41.085.169.975	46.594.642.464
1.	Pajak Hotel	345.828.568	593.776.941	614.390.182	798.340.028	787.329.500	1.278.386.597	1.189.365.815	1.509.774.624
2.	Pajak Restoran	720.997.010	1.129.380.531	99.317.384	1.471.158.203	1.443.145.600	1.841.112.512	1.669.237.491	2.003.382.401
3	Pajak Hiburan	187.767.752	259.274.879	179.379.800	252.692.616	183.789.100	215.179.520	182.939.367	251.838.600
4.	Pajak Reklame	520.257.359	442.577.991	410.727.846	899.738.195	713.103.000	1.158.876.210	859.469.896	1.326.060.266
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.837.913.215	2.355.399.978	2.146.000.000	3.102.368.745	3.266.086.000	4.111.254.189	4.520.107.854	5.318.700.739
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.211.733.245	11.179.664.733	12.644.175.090	17.368.563.725	12.597.068.000	13.669.306.393	11.960.820.298	14.352.254.095
7.	Pajak Parkir	28.000.000	43.312.664	33.600.000	40.609.150	33.600.000	41.816.250	32.423.667	34.251.500
8.	Pajak Air Bawah Tanah	-	-	33.624.000	66.337.486	66.966.700	79.401.542	76.805.587	81.556.872
9.	Pajak Sarang Burung Walet	56.812.500	70.233.750	60.000.000	103.695.000	100.000.000	107.965.500	94.000.000	97.035.000
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	1.231.087.165	4.489.838.880	2.206.268.800	2.276.481.092	20.500.000.000	21.619.788.367

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, 2018.

perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 3.

Dengan melihat gambaran tersebut dalam realisasi penerimaan, maka secara umum PAD Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Namun dari penerimaan tersebut, sektor pariwisata di Kabupaten Belitung belum berdampak secara signifikan sebagaimana tercermin masih di bawah penerimaan dari sektor pertambangan.

Arti penting upaya peningkatan tersebut karena untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di daerah, PAD perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah untuk mencari potensi penerimaan. Prioritas kebijakan keuangan daerah khususnya pada PAD-nya dapat dilihat pada pernyataan Kristiadi (1998) bahwa, penerimaan daerah yang terpenting banyak tergantung pada tingkat pendapatan dan perekonomian setempat yang langsung dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi nasional. Usaha peningkatan PAD yang tanpa memerhatikan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan potensi yang ada, akan menimbulkan gangguan terhadap kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan akan menghambat sektor-sektor ekonomi tertentu. Upaya kebijakan untuk mendukung keuangan daerah secara umum perlu memerhatikan sejumlah hal sebagai berikut:

1. PAD seyogyanya lebih dititikberatkan terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi karena berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang akan diarahkan pada kemampuan pelayanan yang lebih dapat memuaskan publik atau masyarakat.
2. Sektor pajak seharusnya dapat dimobilisasi dengan cara memberikan perhatian pada objek-objek yang potensial, yang memberikan hasil banyak. Dan penghapusan atas objek pajak yang hanya memberi beban banyak dalam pemungutannya.

Tingginya kemampuan dan kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah (APBD) karena ciri utama yang menunjukkan daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Dengan demikian, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diharapkan memiliki proporsi yang semakin kecil dan peningkatan PAD yang seharusnya dapat bagian terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dampak dari penerimaan daerah adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut yang sah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Daerah	34.568.816.090	44.159.994.072	41.016.906.000	51.656.517.034	47.846.280.000	67.478.123.217	66.152.000.000	96.725.121.185
1.	Pajak Hotel	2.058.415.729	2.293.448.590	2.801.208.000	4.953.931.372	5.329.464.000	7.267.860.474	6.382.000.000	8.545.529.716
2.	Pajak Restoran	2.086.993.750	2.851.781.779	2.327.280.000	3.329.500.370	3.643.910.000	4.540.450.636	4.048.000.000	5.133.797.473
3.	Pajak Hiburan	296.492.288	366.977.331	413.100.000	462.651.765	415.600.000	456.849.814	462.000.000	620.655.714
4.	Pajak Reklame	1.372.226.840	1.570.854.909	1.373.400.000	1.103.719.605	875.837.000	1.186.394.261	919.000.000	1.395.732.238
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.442.209.808	6.607.011.684	6.120.000.000	7.846.261.308	8.007.150.000	8.511.981.678	8.500.000.000	10.177.984.410
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.631.677.075	17.660.015.321	16.791.920.000	19.813.625.667	18.576.332.000	24.309.551.474	27.331.000.000	39.091.865.414
7.	Pajak Parkir	32.423.600	40.680.775	34.680.000	56.419.000	49.387.000	70.237.500	145.000.000	150.259.500
8.	Pajak Air Bawah Tanah	79.718.000	81.934.176	79.718.000	85.559.220	73.000.000	101.683.920	89.000.000	110.396.040
9.	Pajak Sarang Burung Walet	68.659.000	93.582.000	75.600.000	85.845.000	75.600.000	87.420.000	76.000.000	91.320.000
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	3.500.000.000	6.110.634.822	4.000.000.000	4.906.798.919	4.000.000.000	6.062.828.513	4.500.000.000	5.588.228.093
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000	6.483.072.685	7.000.000.000	9.012.204.809	6.800.000.000	14.882.864.947	13.700.000.000	25.819.352.588

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, 2018.

keuangan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD yang dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Halim & Kusufi, 2002).

Dengan adanya peraturan di bidang pariwisata maka perlu dilakukan revisi. Alasan diperlukan revisi, karena selama ini penerimaan dari sektor pariwisata belum dapat dijadikan andalan pendapatan daerah tersebut. Namun, dengan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kepariwisataan maju dengan pesat, diyakini di tahun mendatang sektor pariwisata diperkirakan bisa dijadikan pendapatan unggulan bagi pemerintah daerah tersebut untuk menopang penerimaan APBD. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk semua jenis penerimaan. Upaya peningkatan sektor pariwisata agar dapat memberi dampak terhadap pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi semua potensi penerimaan dilakukan melalui Tim Optimalisasi PAD. Tim ini terdiri dari dinas-dinas teknis yang mengelola penerimaan pendapatan daerah (BPRD Kab. Belitung, 2018).

Optimalisasi Penerimaan Sektor Pariwisata

Berkembangnya destinasi tujuan pariwisata Kabupaten Belitung tampaknya terjadi setelah

adanya tayangan film "Laskar Pelangi". Momentum ini dimanfaatkan dengan menjadikan pariwisata sebagai potensi penerimaan sehingga pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menggali potensi pariwisata yang kini sudah semakin maju. Hal ini terjadi karena pariwisata di kabupaten tersebut terbukti bisa meningkatkan PAD. Bahkan, sejumlah PAD yang terkait dengan kegiatan pariwisata di beberapa destinasi mengalami lonjakan tajam akibat dorongan pembangunan infrastruktur dan program-program pariwisata yang tepat lainnya.

Pertumbuhan pariwisata Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Terlebih setelah salah satu objek destinasi dijadikan KEK pariwisata yang memberi pengaruh yang besar. Implikasinya, pembangunan secara umum otomatis mengalami percepatan. Hasilnya semakin terlihat di lima tahun terakhir ini terutama sejak pemerintah pusat menetapkan KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, PAD-nya meningkat 300 persen selama 4 tahun. Hal ini disebabkan oleh kunjungan wisatawan melonjak sehingga dampak perekonomian pun kian dirasakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zebua (2016) bahwa selain masyarakat, pemerintah daerah juga akan memperoleh pendapatan dari beberapa sumber seperti penjualan tiket masuk objek dan daya tarik wisata, serta pajak badan dan dampak lain akibat aktivitas dari pariwisata.

Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata untuk menggenjot kunjungan, khususnya di 10 destinasi prioritas, utamanya dengan konsep destinasi pariwisata terdapat komponen utama yang dikarakteristikan sebagai enam kerangka A, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, *available packages* (paket wisata yang tersedia), aktivitas, dan *ancillary services* (layanan tambahan). Dalam kerangka ini, destinasi wisata dapat dihubungkan dengan kombinasi seluruh produk, jasa, dan pengalaman yang ditawarkan. Komponen tersebut dapat membantu melihat dampak pariwisata secara regional serta mengatur penawaran dan permintaan untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh pelaku (LPEM-FEBUI, 2018). Hasilnya, kebijakan tersebut mampu mendorong penerimaan yang pada tahun 2014, PAD pariwisata-nya yang pada saat itu sebesar Rp7.123.743.384 mengalami kenaikan menjadi Rp20.288.184.459 pada tahun 2018.

Sejak menjadi destinasi prioritas, ada beberapa atraksi di kabupaten ini yang dibuat dengan standar internasional. Lalu, Belitung *Geopark* didaftarkan ke UNESCO *Global Geopark* (UGG) dengan asesor pada Juni 2019 dan penilaian akan diumumkan pada April 2020. Di mana syarat-syarat dan data yang dibutuhkan untuk *dossier* dan kelengkapan administrasi pun dibantu oleh berbagai pihak dan perguruan tinggi.

Namun demikian, secara umum pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung bagaimana pun masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan sejumlah indikator berikut:

- a. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, di mana kondisi tersebut adanya disparitas pembangunan antardaerah. Kondisi tersebut terlihat dari belum berkembangnya kawasan strategis dan zona pertumbuhan yang selama ini masih tergantung pengelolaan SDA, rendahnya daya saing daerah, pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum optimal sebagai potensi alternatif. Akibatnya, perkembangan pariwisata belum optimal sebagaimana tercermin pada belum berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- b. Potensi pariwisata belum maksimal karena masih rendahnya kualitas lingkungan hidup sekitar objek-objek pariwisata. Hal ini salah satunya dampak dari belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang yang sebenarnya dapat dijadikan objek pariwisata, misalnya Danau Kaolin. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut. Hal lain belum mantapnya pemanfaatan ruang ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai

akibat konektivitas inter dan intra-wilayah belum optimal; pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih terbatas; dan rendahnya rasio elektrifikasi (RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018).

- c. Kondisi pemerintahan dan politik yang belum mantap, yang dipengaruhi oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya kompetensi aparatur; kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum maksimalnya peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat; dan masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan. Faktor-faktor lokasional yang memengaruhi pengembangan potensi objek wisata adalah kondisi fisik, aksesibilitas, pemilikan dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain, seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik (Pearce, 1983).

Dampak dari perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Belitung harus didukung dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada, baik potensi SDA dan sumber daya manusia (SDM). Pemanfaatan potensi SDA perlu ditingkatkan dengan tidak melupakan pelestarian yang berkelanjutan. Dengan masih adanya aktivitas sektor pertambangan dan penggalian yang rentan terhadap pengrusakan kualitas lingkungan, selain itu perilaku kurang baik dari aktivitas masyarakat juga memberikan kontribusi di dalam degradasi kualitas lingkungan akibatnya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di darat, laut, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara cukup mengkhawatirkan.

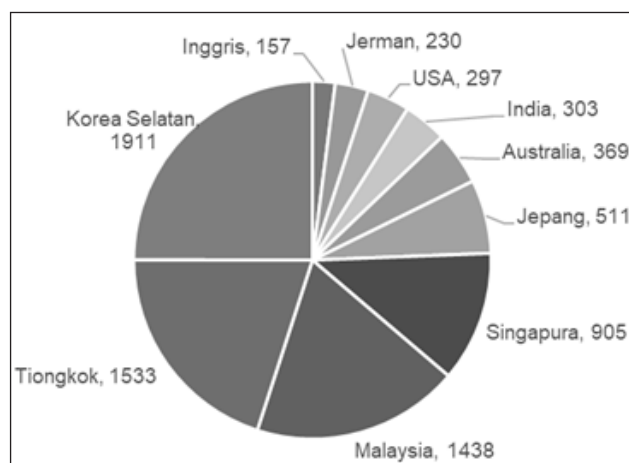
Kecepatan rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan hidup tidak sebanding dengan kecepatan degradasi kualitas lingkungan. Salah satu faktor penyebab adalah pelaksanaan reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah semakin tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup akan berpengaruh buruk terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan akan memaksa daerah untuk mengeluarkan anggaran yang sangat besar dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan tersebut.

Keindahan pantai dan laut yang dimiliki daerah yang menjadi destinasi alam, merupakan suatu potensi besar bagi pengembangan industri kepariwisataan Belitung. Para wisatawan baik asing maupun domestik sangat tertarik dan mengagumi potensi ini. Hal ini tergambar melalui data jumlah wisatawan yang berkunjung dimana

antara periode tahun 2015-2016 terjadi lonjakan jumlahnya mencapai 0,15 persen. Khusus untuk wisman, wisatawan dari Korea Selatan merupakan wisatawan yang paling banyak dengan jumlah 1.911 orang, diikuti oleh Tiongkok sebanyak 1.533 orang dan Malaysia sebanyak 1.438 orang wisatawan dan beberapa negara lain seperti Inggris yang mencapai 157 orang (Gambar 1).

Namun, di sisi lain ada kekhawatiran akan terjadinya kejenuhan wisatawan terhadap wisata pantai dan laut. Oleh karena itu, perlu adanya diversifikasi destinasi wisata baru. Kabupaten Belitung, pada dasarnya cukup banyak memiliki potensi wisata selain pantai dan laut, antara lain wisata alam, agro, budaya, sejarah, religi, kuliner, dan lain sebagainya. Guna mendukung diversifikasi dan pengembangan sektor pariwisata maka pengelolaan dan penataan kawasan wisata sangat diperlukan. Pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan pemanfaatan jasa lingkungan juga merupakan upaya daerah untuk menciptakan embrio bagi pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan urusan kepariwisataan daerah.

Strategi lain, melakukan pembangunan transportasi untuk menunjang sektor tersebut secara keseluruhan dan terintegrasi. Pembangunan transportasi daerah dapat difokuskan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai, sedangkan pembangunan transportasi laut difokuskan kepada pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Batu, dan pembangunan transportasi udara dapat difokuskan kepada pengembangan Bandara Udara H.A.S Hanandjoedin. Semua ini tentunya mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan wewenang daerah. Dengan keterbatasan kemampuan khususnya kemampuan keuangan daerah maka pembangunan dan



Sumber: Dinas Kepariwisata Kabupaten Belitung, 2018.

Gambar 1. Kunjungan Wisman 10 Negara Teratas di Kabupaten Belitung Tahun 2017

pengembangan perhubungan perlu mempergunakan konsep dan pola kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Sektor pariwisata juga menjadi alat untuk mewujudkan tujuan ekonomi pembangunan Kabupaten Belitung. Tujuan ekonomi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan berbasis pada sektor perikanan dan pariwisata yang didukung ketersediaan fasilitas perhubungan yang memadai. Hal ini sejalan dengan hasil analisis Kristianti & Bala (2019), tersedianya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang cukup lengkap, seperti hotel, transportasi umum, *restaurant/café*, maupun layanan kepariwisataan lainnya. Selain membantu untuk meningkatkan PAD, sektor pariwisata juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat melalui pembukaan peluang bisnis dan lapangan pekerjaan baru.

Bahkan dalam dokumen perencanaannya, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang pengembangannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembangunan kepariwisataan ini juga diarahkan kepada dukungan dan penciptaan sentra-sentra kegiatan perekonomian masyarakat, investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Pengelolaan kawasan pariwisata dalam jangka panjang diarahkan pada upaya pengembangan kawasan terpadu dengan mengandalkan daya tarik wisata alam, bahari, budaya, dan sejarah.

Namun permasalahan masih tetap terjadi misalnya masih adanya persoalan pengembangan destinasi dan atraksi yang dalam tahap pengembangan bersama dengan 18 destinasi wisata pantai lainnya di Kabupaten Belitung. Pengelolaan objek wisata pantai Tanjung Kelayang, misalnya masih terkendala karena lahan objek wisata sebagian bukan milik pemerintah daerah tersebut. Hal ini jadi benturan dalam pengelolaan objek wisata antara pemerintah dan masyarakat. Demikian pula sarana transportasi angkutan umum menuju lokasi objek wisata belum tersedia, termasuk fasilitas umum seperti toilet belum memadai dan jumlahnya tidak mencukupi. Selain itu, atraksi wisata seperti kegiatan seni budaya, juga belum diselenggarakan secara rutin dan tidak maksimal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Hal tersebut juga merupakan pembahasan dalam diskusi dengan pelaku wisata yang menyatakan perlu mendorong kegiatan sektor pariwisata untuk meningkatkan penerimaan daerah dan para pelaku wisata. Ada beberapa hal yang

perlu menjadi perhatian antara lain kemudahan pembentukan izin usaha dan menjamin kelanjutan dalam usaha KUKM, membentuk pola pikir berbasis pariwisata. Selain itu, perlunya pelatihan bagi para pelaku usaha dalam pengembangan kompetensi Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Pekerjaan rumah mendesak yang harus dikerjakan untuk mendorong sektor pariwisata dapat mendongkrak PAD adalah akses para wisatawan terhadap sarana transportasi. Untuk transportasi laut misalnya akses ke pulau, para wisatawan memanfaatkan perahu nelayan yang belum memiliki standar keamanan. Walaupun di satu sisi, hal ini menjadi keuntungan bagi nelayan yang beralih pekerjaan dari pencari ikan menjadi pengemudi perahu *boat* sebagai pengantar wisatawan. Pola ini secara umum bagaimana menunjukkan belum optimalnya tata kelola sektor kepariwisataan di sisi lain.⁴

Dengan demikian tantangan Kabupaten Belitung dalam meningkatkan proporsi penerimaan dari sektor pariwisata memerlukan beberapa upaya terobosan. Dengan demikian, pengembangan potensi pariwisata daerah dapat diarahkan pada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber PAD baru yang kesemuanya diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan urusan pariwisata secara umum terdiri dari:

- a. belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah,
- b. belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek-objek wisata,
- c. belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata,
- d. tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang,
- e. belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta
- f. belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi SDM bidang pariwisata.

Namun dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Belitung mengalami keterlambatan. Sekitar dua tahun mengalami kemunduran karena terkendala beberapa teknis birokrasi. Salah satu yang dinilai membuat lamban pengembangan pariwisata di Belitung, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga kini belum selesai. Kebijakan tersebut masih dibahas pada tingkat provinsi sehingga para investor yang berminat mengembangkan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil terhambat.

⁴ Hasil rangkuman diskusi dengan Indry Permana dan para pelaku pariwisata, di Tanjung Pandan, Belitung, Tanggal 20 Agustus 2018

Selain itu, daerah juga memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan lebih lanjut seperti wisata budaya dan sejarah, wisata geologi (*geopark*), wisata agro, dan wisata petualangan yang dilengkapi dengan beragam atraksi seni dan budaya yang mencerminkan ciri khas daerah Belitung. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah diarahkan pada (1) pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, (2) peningkatan pemasaran pariwisata, (3) peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata daerah, (4) peningkatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (5) peningkatan kerja sama dan fasilitasi pembangunan ekonomi kreatif. Hal ini tentunya harus sejalan dengan arah dan konsep pembangunan kepariwisataan daerah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KEK pariwisata).

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Belitung telah berdampak pada peningkatan penerimaan PAD secara umum. Hal tersebut dapat diketahui dari penerimaan sektor pariwisata yang mengalami peningkatan. Selain itu, peningkatan sektor pariwisata tersebut juga berdampak terhadap pergeseran kegiatan ekonomi masyarakatnya yang kegiatannya menggantungkan pada sektor pariwisata. Namun demikian, secara umum potensi penerimaan tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu perhatian kuat pemerintah daerah untuk mengatasi beragam kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan objek pariwisata.

KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata di Kabupaten Belitung berperan penting dalam perekonomian daerah secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan sumbangannya yang cukup signifikan bagi penerimaan daerah. Pengeluaran wisatawan, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah memberikan dampak pengganda ekonomi berupa pertambahan *output*, nilai tambah, pendapatan daerah, dan penciptaan tenaga kerja di Kabupaten Belitung.

Pesatnya perkembangan pariwisata Kabupaten Belitung didorong oleh meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata dan promosi yang dilakukan, serta hasil program dan kegiatan pariwisata lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan jumlah akomodasi, baik hotel berbintang dan penginapan. Peningkatan dampak positif sektor pariwisata secara ekonomi tergambar jelas dari

jumlah penerimaan berbagai sektor kegiatan pariwisata dari pajak dan retribusi serta kegiatan dari sektor jasa dan perhotelan. Namun demikian, proporsi penerimaan masih belum optimal. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk meningkatkan penerimaan sektor pariwisata ini.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung juga membuat pemerintah dan masyarakat setempat mulai memfokuskan diri di sektor pariwisata dan perlahan-lahan mulai meninggalkan sektor tambang. Kebijakan moratorium pertambangan timah semakin memantapkan langkah Kabupaten Belitung untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan penduduknya. Semakin meningkatnya dampak sektor pariwisata bagi PAD akan semakin meningkatkan kegiatan ekonomi secara umum sehingga berpotensi menurunkan peran dominan penerimaan dari sektor tambang.

Namun demikian, untuk meningkatkan optimalisasi proporsi penerimaan sektor pariwisata, Kabupaten Belitung perlu upaya yang lebih serius dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang memadai untuk kemudahan akses objek-objek pariwisata. Selain itu, peran pemerintah pusat untuk mempromosikan objek-objek serta keputusan terkait pengelolaan bandara udara pada daerah tersebut untuk mendorong investasi dalam sektor ini juga diperlukan. Untuk tujuan tersebut, penyediaan dan pendidikan SDM yang memadai untuk menunjang pengembangan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPS. (2017). *Kabupaten Belitung dalam angka tahun 2017*. Kabupaten Belitung: BPS.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2002). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Harun, H. (2004). *Analisis peningkatan PAD*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Kaho, R.J. (2007). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggarannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kodhyat, H. (1996). *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia*. Grasindo: Jakarta.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pearce, D. (1983). *Tourist development: Topics in applied geography*. England: Longmand Group Limited.

Sihite, R. (2000). *Tourism industry Kepariwisataa (Kepariwisataa)*. Surabaya: SIC.

Spillane, J.J. (1987). *Ekonomi pariwisata sejarah dan perkembangannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Yani, A. (2013). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yoeti, O.A. (1991). *Pemasaran pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Zebua, M. (2016). *Inspirasi pengembangan pariwisata daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Jurnal

- Chen, M-Hsiang. (2011). The response of hotel performance to international tourism development and crisis events. *International Journal Of Hospitality Management*, 30(1), 200-212.
- Dewi, A.A.I.A.D.S., & Bendesa, I.K.G. (2013). Analisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ep Unud*, 5(2), 260-275.
- Koeswara, E. (2000). Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999: Suatu telaahan dan menyangkut kebijakan, pelaksanaan dan kompleksitasnya. *Analisis CSIS*, 29(1), 51-52.
- Kristiadi, J.B. (1998). Masalah sekitar pendapatan daerah, Prisma, No. XII, LP3ES, Jakarta, 40-57.
- Kristianti, I., & Bala, M. (2019), Analisis sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 35-46.
- Mahi, B.R. (2000). Prospek desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi. *Analisis CSIS*, 29(1), 54-56.
- Purwadinata, S., & Kaluge, D. (2017). Apakah inovasi pajak daerah memperlambat daya inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal? (Studi di Kabupaten Sumbawa, Indonesia). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(2), 43-56.
- Roostika, R. (2012). Analisis pengaruh bauran pemasaran produk cinderamata terhadap kepuasan wisatawan domestik di Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 104-116.

- Rosa, Y.D., Sovita, I., & Idwar. (2016). Analisis dampak sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2000-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 160-184.
- Suastika, I G.Y., & Yasa, I N.M. (2017). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(7),1332-1363.
- Udayantini, K.D., Bagia, I.W., & Suwendra, I.W. (2015). Pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1- 10.
- Widiana, I.N.W., & Sudiana, I.K. (2015). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 4(11), 1357-1390.
- Laporan**
- LPEM-FEBUI. (2018). Kajian awal dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. *Laporan Akhir*. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI).
- Website**
- Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024. Diakses 20 November 2019 dari https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf.
- Biro Hukum dan Komunikasi Publik. (2015, 26 Agustus). Pariwisata kini jadi andalan pendulang devisa negara. Diakses 20 November 2019 dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959>, 26-Agu-2015.
- Indonesia.go.id. (2019, 4 April). Profil kota, Laskar Pelangi dan kebangkitan destinasi wisata kelas dunia. Diakses 20 November 2019 dari <https://www.indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/laskar-pelangi-dan-kebangkitan-destinasi-wisata-kelas-dunia>.
- Indopos.com. (2018, 6 Januari). Pariwisata dan e-commerce jadi unggulan investasi Indonesia di 2018. Diakses 20 November 2019 dari <https://indopos.co.id/read/2018/01/06/122402/pariwisata-dan-e-commerce-jadi-unggulan-investasi-indonesia-di-2018/>.
- koran-jakarta.com. (2018, 7 Mei). Belitung fokus kembangkan sektor pariwisata. Diakses 20 November 2019 dari <http://www.koran-jakarta.com/belitung-fokus-kembangkan-sektor-pariwisata/>.
- Sukmana, Y. (2017, 17 Oktober). 3 tahun Jokowi-JK, Pariwisata sumbang devisa terbesar kedua. Diakses 20 November 2019 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/220236426/3-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>.
- Susanti, I. (2017, 17 Agustus). Targetkan ranking 20 dunia, Kontribusi pertumbuhan pariwisata di sektor ekonomi terbesar dan tercepat. Diakses 20 November 2019 dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648>.
- Dokumen Resmi**
- RPJMD. (n.d). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018. Kabupaten Belitung: Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.